



**DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA 2025

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KOMPLEKS PERKANTORAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA GEDUNG D LANTAI 2
JALAN WOTER MONGINSIDI TENGGARONG 75511 Email: pppa.kabkukar@yahoo.com / dinaspppa.kukarkab@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : **P-4/DP3A/000.7/01/2024**

T E N T A N G
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Pengguna Anggaran tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah di ubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

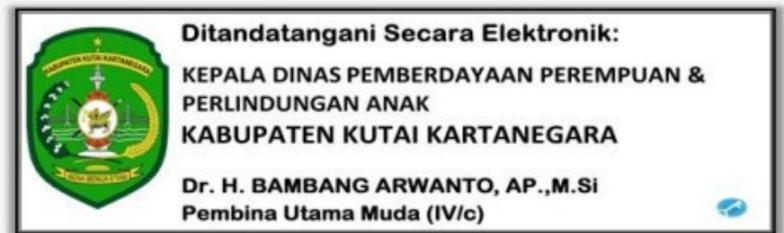
- Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 221 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026;
 9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menginventarisir dan menyiapkan data sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - b. mengkaji dan meneliti bahan dan data yang disajikan untuk penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - c. melaksanakan koordinasi intern Tim Penyusun guna penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - d. merumuskan kebijakan guna kelancaran penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - e. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan tugas penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara tepat waktu;
 - g. melaporkan hasilnya pada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selaku Pengguna Anggaran.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 24 Januari 2024



Tembusan Yth :

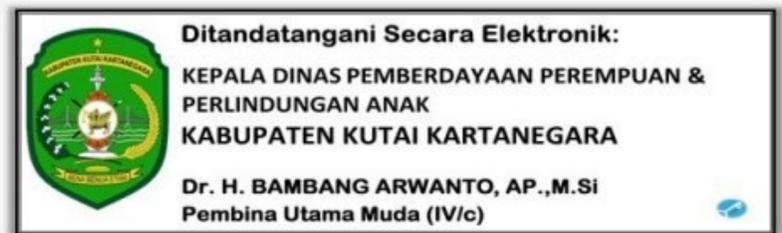
1. Bupati Kutai Kartanegara ;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara ;
5. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KUTAI
KARTANEGRA
NOMOR : **P-4/DP3A/000.7/01/2024**
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2025

- a. Pengarah/Penanggung Jawab : Kepala Dinas
b. Ketua : Sekretaris
c. Sekretaris : Sub Koord Penyusunan Program dan Keuangan
Anggota : 1. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga Data dan Informasi
2. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
3. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak
4. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Ketatalaksanaan.
6. Sub Koord Penggerak Swadaya Masyarakat
7. Sub Koord Pengawas Pembimbing Kemasyarakatan

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 24 Januari 2024



KATA PENGANTAR

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu di susun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud Undang-undang disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya yang di laksanakan khususnya Pemerintah Kabuapten Kutai Kartanegara.

Adapun Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara selanjutnya di Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 disusun untuk jangka waktu 1 tahun. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara berpedoman pada rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2005 – 2025. Lebih lanjut isi dari Renja ini adalah gambaran perencanaan berbagai rencana pembangunan yang menjadi bagian dari tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai program dan kegiatan serta memperhatikan berbagai kondisi dan potensi lokal yang akan menjadi bagian dalam proses pembangunan di masa-masa yang akan datang.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara, diharapkan rencana kerja ini dapat memberikan kontribusi yang lebih baik lagi bagi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tenggarong, 25 Januari 2024
Kepala Dinas


Dr.H.BAMBANG ARWANTO,AP.,M.Si
NIP. 19740111 199311 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar isi.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Landasan Hukum.....	5
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA -PD TAHUN LALU.....	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD	28
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD ...	35
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	37
BAB III TUJUAN DAN SASARAN OPD	43
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	43
3.2. Tujuan dan Sasaran	48
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	50
4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	50
BAB V PENUTUP.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 . LATAR BELAKANG

Perencanaan Pembangunan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang di lakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan global. Perencanaan pembangunan daerah sangat penting untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah secara sistematis terarah terpadu menyeluruh dan tanggapan terhadap perubahan yang berjangka panjang, menengah dan jangka pendek, sebagaimana di amanatkan dalam UU nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap daerah harus menyusun rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-OPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana program kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. Rencana kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak menjabarkan visi dan misi serta arah pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra).

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah juga melaksanakan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, dimana penyelenggaraan Tata Pemerintah melakukan Pengintegrasian Gender melalui kelembagaan, perencanaan, dan penganggaran.



Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis dan implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 di mana Renja merupakan dokumen perencanaan OPD untuk 1(satu) tahunan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Dalam Rencana Kerja memuat visi misi tujuan kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan yang bersifat indikatif didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di daerah dan berorientasi pada hasil yang akan di capai selama kurun waktu 1 tahun .

Hal tersebut merupakan pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah, DPRD, kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak dibidang Sosial Budaya, Ekonomi, Politik dan Keamanan. Untuk mencapai hal tersebut proses pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan sistematis mulai dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Pemeliharaan hasil-hasilnya.

Dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan adalah merupakan instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, dengan kata lain perencanaan pembangunan yang baik akan dapat menghasilkan pembangunan yang baik yang dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar.

Dalam RPJM Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 sesuai Visi Bupati yaitu : **“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”** diamanatkan lima misi pembangunan Kutai Kartanegara dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masuk



pada misi ke dua yaitu “MENINGKATNYA PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERAKHLAK MULIA, UNGGUL DAN BERBUDAYA “

Dalam pencapaian Visi dan Misi RPJMD Tahun 2021-2026 Kabupaten Kutai Kartanegara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai OPD pendukung yang juga mempunyai tanggungjawab terhadap terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Daerah. Terdapat beberapa persoalan-persoalan pembangunan yang telah dirumuskan dan harus segera diatasi yaitu belum optimalnya peranan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan (kesetaraan gender). Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan rencana kerja dalam rangka penentuan kebijakan pembangunan daerah guna mencapai tujuan dan target pembangunan yang telah ditetapkan dalam misi ke dua RPJMD pembangunan tersebut.

1.2. LANDASAN HUKUM

Adapun pelaksanaan Penyusunan Rencana (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 memperhatikan kepada peraturan Perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan Renja dan arah garis kebijakan terkait yang di rumuskan antara lain :

- 1) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);



- 5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 2 Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7) Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonnesia nomor 4438;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 10) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 16) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- 17) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembaguan Jangka Menegah Nasional Tahun 2015-2019;
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 19) Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor B-645/BAPP/065.11/03/2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari dibuatnya Rencana kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah :

1. Untuk menentukan arah pelaksanaan pembangunan serta sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun yang sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati/Wakil Bupati Kutai Kartanegara Periode 2021-2026.
2. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Pembangunan Daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025.

Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu :



- 1 Menciptakan keterpaduan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai Visi Misi Pemerintah Daerah.
- 2 Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu terarah dan terukur.
- 3 Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan Operasional Tahunan dalam rentang waktu 1 tahun.
- 4 Memberikan pedoman alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA -PD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat



BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

BAB IV RENACANA KERJA DAN PENDANAAN

- 4.1. Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II



EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja –PD Tahun lalu dan Capaian Renstra PD

Proses Penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut, hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Rencana Kerja (RENJA) suatu Perangkat Daerah adalah Penjabaran Perencanaan Tahunan dari Rencana Strategis Perangkat Daerah tersebut, tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan, Laporan Kinerja adalah Iktisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur, Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan / Program / kegiatan dan sekaligus merupakan alat ukur untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas.

Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan. Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah di



tetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan, keluaran dan hasil. Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan sebagainya. Penetapan indikator kinerja ini di ikuti dengan penetapan besarnya indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah di ditetapkan. Capaian Analisis Kinerja Pengukuran kinerja di lakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini di lakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Adapun capaian analisis kinerja dan rekapitulasi pelaksanaan Renja sebagaimana mestinya.

Pada tahun 2025 Rencana Kerja Dinas PPPA dengan indikator yang ingin dicapai sesuai dengan sasaran Renstra Perangkat Daerah pada tahun tersebut sebanyak 7 Program terdiri dari 1 program Generik dengan Outcome yang ingin dicapai sebanyak 1 indikator Outcome dan 6 program wajib dengan Outcome yang ingin dicapai sebanyak 6 indikator Outcome dengan pagu program kegiatan yang direncanakan sebesar Rp. 28.415.005.266,-

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu 2023 dan realisasi Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan atau realisasi APBD .

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Indikator kinerja program Nilai Sakip Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan anggaran sebesar Rp.13.473.297.958,- dan realisasinya Rp. 12.249.400.032,- atau sebesar 90.92% capaian kinerja 100%. Target kinerja tercapai.
- 2) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Indikator kinerja program adalah Persentase ARG belanja langsung APBD tahun 2023 yaitu dengan anggaran sebesar Rp. 4.672.780.083,- dan realisasinya Rp. 3.178.406.278,- atau sebesar 68.02% capaian kinerja sebesar 80%. Target kinerja belum tercapai.
 - a. Penyusunan GAP dan GBS dari setiap kegiatan/subkegiatan masih rendah sehingga prosentase ARG pada Belanja Langsung APBD belum terhitung,
 - b. SDM Perencana dari setiap OPD yang sudah dilatih tentang PPRG banyak yang dimutasi.



- c. Solusi/Rekomendasinya melakukan pelatihan secara continuitas terhadap OPD sehingga paham terhadap cara pengisian GAP dan GBS. Membuat aplikasi yang mudah supaya bisa diakses oleh OPD sehingga analisis GAP dan GBS bisa tercapai
- 3) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak indicator kinerja program adalah Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Data Gender tahun 2023 yaitu dengan anggaran sebesar Rp. 330.718.362,- realisasinya Rp. 318.423.661,- atau 96.28 % capaian kinerja sebesar 100% . Target kinerja tercapai.
 - 4) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Indikator kinerja program adalah Persentase Kabupaten Layak Anak tahun 2023 yaitu dengan anggaran sebesar Rp. 868.000.000,- realisasinya Rp. 739.557.871,- atau 88.50 % capaian kinerja sebesar 90% Kendala yang dihadapi adalah :
 - a. Tingkat Pergantian staf yang mengelola dan menangani KLA disetiap perangkat Daerah sering berganti/mutasi.
 - b. Mengikuti jadwal kementerian yg berubah-ubah
 - c. Dukungan semua stekholder belum maksimal.
 - d. Terkendala Letak geografis dan luas Wilayah Kab.Kutai Kartanegara
 - e. Ranah kebijakan Kepala Daerah untuk melakukan mutasi pada jabatan tertentu menjadi hak prerogatif dan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk bisa menyikapi dan memberikan solusi terbaiknya jika terdapat pejabat atau staf yang mengelola dan menangani data persyaratan KLA beraganti atau mutasi.
 - f. Sesuai jadwal kementrian
 - g. Surat Edaran Bupati kepada semua stekholder supaya memberikan dukungan untuk mencapai peringkat Kabupaten Layak Anak
 - h. Dengan memberikan sarana dan prasarana dukungan KLA
 - i. Solusi/Rekomendasinya melakukan rapat koordinasi dengan Tim Gugus Tugas KLA untuk memberikan kebijakan sesuai permasalahan.



- 5) Program Peningkatan Kualitas Keluarga Indikator kinerja Persentase peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak tahun 2023 yaitu dengan anggaran sebesar Rp.315.000.000,- realisasinya Rp. 272.229.900,- atau 86.42% capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai.
- 6) Program Perlindungan Perempuan Indikator kinerja Cakupan pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan tahun 2023 yaitu dengan anggaran sebesar Rp.1.074.100.000,- realisasinya Rp. 845.204.612,- atau 78.69% capaian kinerja sebesar 90%. Kendala yang dihadapi :
 - a. Waktu pelaksanaan kegiatan yang sering berubah-ubah
 - b. Jangkauan pendampingan jauh dari perkotaan
 - c. Jaringan telekomunikasi yang kurang lancar
 - d. Solusi/Rekomendasinya mengkoordinasikan secara intens dengan pihak terkait supaya penjadwalan sesuai rencana
- 7) Program Perlindungan Khusus Anak Indikator Kinerja Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten tahun 2023 yaitu dengan anggaran sebesar Rp.1.704.700.000,- realisasinya capaian kinerja sebesar Rp.1.462.203.652,- atau 85.80%, capaian kinerja sebesar 100%. Kendala yang dihadapi adalah :
 - a. Waktu pelaksanaan kegiatan tidak maksimal sehingga berpengaruh pada penyerapan anggaran terhadap pelayanan perlindungan khusus anak.
 - b. Letak geografis yang jauh dalam penjangkauan kasus yang belum didukung dengan tenaga profesional yang masih kurang.
 - c. Solusi/Rekomendasinya rencana anggaran kas tiap triwulan, penambahan tenaga profesional dan pemenuhan sarana dan prasarana

Sedangkan pada tahun 2023 terjadi peningkatan anggaran dari tahun 2022, anggaran yang dikelola oleh Dinas PPPA sebesar 21.520.596.403,- atau terdapat kenaikan anggaran sebesar 51% sehingga akan berpengaruh terhadap capaian indikator Kinerja Utama maupun Indikator Kinerja Program yang akan ditargetkan sebagai berikut :

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Indikator kinerja program adalah Persentase ARG belanja langsung APBD target 16.10%,



2. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak Indikator Persentase PD yang memiliki Data Gender 81.03%.
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga Indikator kinerja Persentase peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak target 50%.
4. Program Perlindungan Perempuan Indikator kinerja Cakupan pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan target 100%
5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Indikator kinerja program adalah Persentase Kabupaten Layak Anak target 790%
6. Program Perlindungan Khusus Anak Indikator Kinerja Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten target 100%



**Tabel 2.1 (TC_29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2022
Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kutai Kartanegara**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2024)	
					Target Renja-PD tahun (2022)	Realisasi Renja-PD tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP	76,60	74,59	76,35	74,59	97,69	76,45	72,55	94,9
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34,00	6,00	7,00	7,00	100,00	6,00	19,00	55,88
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	14,00	2,00	3,00	3,00	100,00	2,00	8,00	57,14
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20,00	4,00	4,00	4,00	100,00	4,00	12,00	60,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	120,00	24,00	24,00	24,00	100,00	24,00	72,00	60,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60,00	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	36,00	60,00



				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60,00	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	36,00	60,00
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	20,00	4,00	4,00	4,00	100,00	4,00	12,00	60,00
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	20,00	4,00	4,00	4,00	100,00	4,00	12,00	60,00
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	5,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	60,00
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200	53,00	53,00	53,00	100,00	20,00	126,00	63,00
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	35,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	21	60,00
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100,00	20,00	20,00	20,00	100,00	20,00	60,00	60,00
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60,00	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	36,00	60,00
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	3000,00	60,00
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	10560,00	2112,00	2112,00	2112,00	100,00	2112,00	6336,00	60,00
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	27,00	1,00	12,00	1,00	8,33	1,00	14,00	51,85



				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	265,00	53,00	53,00	53,00	100,00	53,00	159,00	60,00
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	5,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	60,00
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	30,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	20,00
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25,00	5,00	5,00	5,00	100,00	5,00	15,00	60,00
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	60,00
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	60,00	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	36,00	60,00
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60,00	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	36,00	60,00
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	175,00	35,00	35,00	35,00	100,00	35,00	105,00	60,00
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60,00	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	36,00	60,00
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	140,00	28,00	28,00	28,00	100,00	28,00	84,00	60,00



			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	125,00	28,00	30,00	28,00	93,33	25,00	81,00	64,80
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10,00	2,00	2,00	2,00	100,00	2,00	6,00	60,00
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	60,00
			2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Ekonomi pada organisasi kemasyarakatan	26,49	8,48	12,18	8,48	69,65	12,18	29,14	110,00
			2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah dan Pemerintah Desa yang telah dilatih PUG	155,00	52,00	20,00	20,00	260,00	56,00	124,00	80,00
			2.08.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	6,00	1,00	6,00	6,00	100,00	1,00	18,00	300,00
			2.08.02.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	24,00	1	3,00	3,00	100,00	1	9,00	37,50
			2.08.02.2.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	275,00	56	56	56	100,00	56		300,00



			2.08.02.2.01.04 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	275,00	56	56	56	100,00	56	825,00	300,00
			2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan yang bergerak dlm bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	150	30	30	30	80,00	30	90	60
			2.08.02.2.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	45	9	9	9	62,50	9	27	60
			2.08.02.2.02.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	105	21	21	21	75,00	21	63	60
			2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	85	27	0	0	0	22	49	57.65
			2.08.02.2.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	10	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,00	40
			2.08.02.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	60	20	0,00	0,00	0,00	20	20	33,33



			2.08.02.2.03.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	15	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	33,33
			2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Profil Gender dan Anak Tingkat Kabupaten	100,00	19,23	28,85	19,23	66,67	12,18	50,64	50,64
			2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data	15,00	2,00	3,00	2,00	66,67	2,00	6,00	40,00
			2.08.05.2.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	6,00	1,00	1,00	1,00	100,00	3,00	5,00	83,33
			2.08.05.2.01.01 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	9,00	1,00	3,00	1,00	33,33	3,00	5,00	55,60
			2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	100,00	58,54	100,00	58,54	58,54	58,54	175,62	175,62
			2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencegahan kekerasan terhadap perempuan	40,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,50
			2.08.03.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	20,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	5,00



			2.08.03.2.01.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan korban kekerasan yang memerlukan Koordinasi	160,00	41,00	41,00	41,00	100,00	41,00	123,00	51,25
			2.08.03.2.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	110,00	50	40,00	40,00	100,00	50	80,00	72,72
			2.08.03.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	30,00	6,00	6,00	6,00	100,00	6,00	18,00	60,00
			2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	75,00	2,00	2,00	2,00	100,00	2,00	6,00	60,00
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.08.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	10,00	2,00	2,00	2,00	100,00	2,00	6,00	60,00



				2.08.03.2.03.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	100,00	97,78	100,00	97,78	97,78	97,78	293,34	293,34
				2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para pihak Lingkup Daerah	95,00	14,00	14,00	14,00	100	14,00	42,00	44,21
				2.08.07.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	40,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	3,00	7,50
				2.08.07.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah korban kekerasan anak yang terlayani	515,00	90,00	100,00	90,00	90,00	0,00	180,00	34,95
				2.08.07.2.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	190,00	152,00	90,00	127,00	141,11	100,00	409	215,26



			2.08.07.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	325,00	60,00	60,00	60,00	60,00	100,00	180,00	53,38
			2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang dibentuk	135,00	25,00	30,00	25,00	83,33	100,00	50,00	37,04
			2.08.07.2.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	50,00	10,00	10,00	10,00	0,00	30,00	40,00	80,00
			2.08.07.2.03.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	75,00	30,00	30,00	30,00	100,00	0,00	60,00	80,00
			2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Capaian Nilai Kabupaten Layak Anak	810,00	710,00	730,00	710,00	97,26	30,00	1450,00	179,01
			2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemenuhan hak anak yang terbentuk	21,00	6,00	8,00	8,00	100,00	100,00	114,00	542,85



			2.08.06.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	8,00	4,00	4,00	4,00	100,00	4,00	8,00	100,00
			2.08.06.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	13,00	2,00	4,00	5,00	125,00	4,00	11,00	84,62
			2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan PHA	28,00	1,00	5,00	1,00	20,00	1,00	3,00	10,72
			2.08.06.2.02.01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	300,00	75,00
			2.08.06.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	12,00	1,00	2,00	2,00	100,00	1,00	4,00	75,00
			2.08.06.2.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,00	75,00
			2.08.06.2.02.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	75,00



			2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Pusat Pembelajaran Keluarga yang terbentuk dalam mewujudkan KG dan Hak Anak	100,00	5,56	11,11	5,56	50,00	5,56	16,68	16,68
			2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	5,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	40,00
			2.08.04.2.01.03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,00	40,00
			2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	18,00	1,00	5,00	1,00	20,00	1,00	3,00	16,67
			2.08.04.2.02.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	65,00	3,00	3,00	3,00	100,00	3,00	9,00	13,85
			2.08.04.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.08.04.2.02.03 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	14,00	1,00	5,00	1,00	20,00	1,00	3,00	21,43



				2.08.04.2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	4,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	3,00	75,00
				2.08.04.2.03.01 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	7,00	0,00	1,00	1,00	100,00	0,00	1,00	14,28



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Dasar pembentukan Dinas PP dan PA Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pemetaan Kewenangan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara serta Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2007, tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (PTPPPO) untuk memerangi perdagangan orang membutuhkan penanganan yang komperhensif dan multi sektor, diharapkan pemerintah daerah (Kutai Kartanegara) memiliki kerangka hukum mengenai (PTPPPO) dan partisipasi setiap anggota masyarakat termasuk anggota keluarga untuk mengambil langkah pencegahan, untuk data perdagangan orang/trafficking, sebanyak 4 kasus tahun 2017, 1 kasus tahun 2022 dan 8 kasus tahun 2023.

Belum tersedianya pemetaan data khusus untuk kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan dengan adanya pemetaan kasus kekerasan ini dapat memudahkan dalam hal penanganan dimasing-masing desa /kecamatan

Perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan *trafficking* dan peningkatan layanan terpadu bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Meski telah ada Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT, pembangunan pusat-pusat krisis terpadu di rumah sakit, pembangunan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di



Polda dan Polres, serta pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan Anak (P2TP2A) di daerah, dan penyebaran informasi dan kampanye anti-kekerasan terhadap perempuan dan anak, namun upaya tersebut belum cukup untuk menekan tingginya tindak kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak. Pada tahun 2022 kasus yang didampingi berjumlah 65 kasus dan tahun 2023 sebanyak 155 kasus.

Untuk penanganan Korban Tindak Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak secara terpadu maka perlu dibentuk Gugus Tugas Pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta penyediaan wadah Advokasi, Sosialisasi dan Koordinasi dalam penanggulangan dan perlindungan Perempuan dan Anak yaitu P2TP2A.

Dilihat dari visi dan misi bupati terpilih untuk RPJMD 2021 – 2026 dengan Misi “Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia” dan Visi kedua yaitu “Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya” adapun sasaran yang ingin dicapai Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, kualitas kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak dengan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

1. Persentase ARG pada belanja langsung APBD;
2. Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan);
3. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi pemerintah terkait Kabupaten.

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah tolak ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam rangka memberikan pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan



Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 yang terdiri dari 5 jenis pelayanan dan 22 indikator kinerja.

Dari hasil pembahasan diatas berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan memberikan pelayanan yang maksimal dan melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya sesuai RPJMD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada Tabel 2.2



**Tabel 2.2 tentang
Pencapaian Kinerja Pelayanan Organisasi Pelayanan Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

No	Indikator Kinerja Utama	SPM/ Standart Nasional	IKK	Target Renstra PD					Realisasi Capaian					Proyeksi	
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2025	2026
1	2	3	4	5					6					7	
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			76,35	76,40	76,45	76,5	76,60	76,40	74,90				100,00	100,00
2	Persentase ARG pada belanja langsung APBD		15,90%	16,95	16,00	16,10	16,15	16,20	0,06	4,87				100,00	100,00
3	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi terkait kabupaten			0,21	0,25	0,29	0,33	0,37	0,21	100				100,00	100,00
4	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)			0,015	0,023	0,031	0,039	0,046	6,18	7,2				100,00	100,00



2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Peran Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara dengan memperhatikan perkembangan dan tantangan yang mutakhir dewasa ini, maka isu permasalahan yang masih dihadapi oleh Dinas PP dan PA Kabupaten Kutai Kartanegara adalah:

1. Belum Optimalnya Anggaran Responsif Gender di masing-masing Perangkat Daerah
2. Masih tingginya korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dan belum didampingi seluruhnya oleh tenaga terlatih
3. Belum terpenuhinya pelayanan penanganan kasus sesuai dengan SPM
4. Belum optimalnya para pengambil kebijakan dalam membuat kebijakan yang responsif anak
5. Kurangnya pemahaman stakeholder terhadap hak-hak anak
6. Kelembagaan PUG di OPD belum optimal
7. Kurangnya perempuan sebagai pelaku ekonomi yang mendapat pembinaan

Dari permasalahan diatas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara memerlukan kolaborasi dan dukungan instansi terkait dalam memberikan pelayanan dan peningkatan pemberdayaan perempuan, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, politik, hukum, social dan ekonomi.

Sesuai amanah Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 tentang Kabupaten Kota Layak Anak, dan memperhatikan Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 56 thn 2010 tanggal 26 juli 2010 tentang Penunjukan dan Penetapan bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara ditunjuk sebagai 10 Kabupaten / Kota Pengembang Kota / Kabupaten Kota Layak Anak, maka berkaitan dengan hal diatas dapat diidentifikasi Implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas PP PA Kabupaten Kutai Kartanegara disusun dalam rancangan program pembangunan menuju Kabupaten Layak Anak (KLA). KLA adalah Pembangunan menuju Kabupaten/Kota Layak Anak, yaitu sistem Pembangunan Berbasis Pemenuhan Hak Anak melalui Pengintegrasian Komitmen dan Sumber Daya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program dan



kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Pembangunan berbasis pada perwujudan menuju Kabupaten/Kota Layak Anak secara tidak langsung akan memenuhi kebutuhan penataan ruang sebuah lingkungan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Arahan Pengembangan Pelayanan OPD:

- a. Ketersediaan dan kemudahan jangkauan Lembaga Kesejahteraan Anak;
- b. Jumlah Pojok ASI yang memadai dan layak, di tempat umum (Bandara, pusat perbelanjaan, terminal dll) tempat kerja;
- c. Ketersediaan Rumah Tangga dengan akses air bersih;
- d. Ketersediaan Kawasan tanpa asap rokok;
- e. Tersedianya sekolah yang ramah Anak;
- f. Ketersediaan dan kemudahan jangkauan Lembaga Kesejahteraan Anak;
- g. Tersedianya sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah;
- h. Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif yang ramah anak diluar sekolah dan dapat diakses semua anak;
- i. Tersedianya lembaga perlindungan anak bermasalah dengan hukum; dan
- j. Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan keperluan anak.

Untuk menanggulangi permasalahan dan isu-isu diatas maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan salah satunya adalah melalui :

1. Program Perlindungan Perempuan dengan Indikator Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 jumlah penduduk perempuan)
2. Program Perlindungan Anak dengan indikator Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten
3. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan indikator Persentase ARG pada belanja langsung APBD
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dengan Indikator Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Profil Gender dan Anak Tingkat Kabupaten
5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dengan Indikator Persentase Kabupaten Layak Anak
6. Program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan Indikator Persentase



2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Sejalan dengan pokok-pokok kebijakan dan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJPD dan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu menyusun Rencana Strategis (RENSTRA). Dokumen Renstra OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 - 2026 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah, yang dalam proses penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJMD. Renstra SKPD dijabarkan setiap tahun kedalam Rencana Kerja SKPD sebagai pedoman dalam penyusunan RKA OPD yang mengacu pada kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA- PPAS).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas ada perubahan dalam sasaran strategis dimana pada awal perencanaan Renstra terdapat dua (2) sasaran, setelah dokumen RPJMD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 sudah disahkan sehingga ada perubahan sasaran strategis pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dapat dilihat dibawah ini :

SEBELUM		SESUDAH	
Sasaran Strategis	Indikator Kineja Utama	Sasaran Strategis	Indikator Kineja Utama
Meningkatnya Partisipasi pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta Penguatan Perlindungan Perempuan dan anak	IDG	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD
	Ratio KDRT		Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi terkait kabupaten
			Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)



Tabel T-C.31.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Sesuai Renstra
Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Rancangan awal RKPD						No	Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	KET
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Indikatif		Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	1	9	10	11	5	13	7	15	16
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76,5	Nilai	7.025.337.513	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76,5	Nilai	7.025.337.513		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	dokumen	175.000.000	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	dokumen	175.000.000		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	dokumen	100.000.000	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	dokumen	100.000.000		kolaborasi
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	laporan	75.000.000	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	laporan	75.000.000		kolaborasi



2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	2	laporan	5.773.888.961	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	2	laporan	5.773.888.961		
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40	orang/bulan	5.644.691.162	3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40	orang/bulan	5.644.691.162		
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	laporan	129.197.799	4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	laporan	129.197.799		
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	2	Laporan	30.845.916	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	2	Laporan	30.845.916		
5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	laporan	30.845.916	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	laporan	30.845.916		



4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen	70.000.000	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen	70.000.000		
6	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20	orang	70.000.000	6	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20	orang	70.000.000		
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6	Layanan	289.500.000	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6	Layanan	289.500.000		
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	paket	60.000.000	7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	paket	60.000.000		
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	paket	5.000.000	8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	paket	5.000.000		
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	8.500.000	9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	8.500.000		
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1	dokumen	9.000.000	10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1	dokumen	9.000.000		



11	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	laporan	50.000.000	11	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	laporan	50.000.000		
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	laporan	117.000.000	12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	laporan	117.000.000		
13	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	dokumen	40.000.000	13	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	dokumen	40.000.000		
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	3	Layanan	79.674.000	6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	3	unit	79.674.000		
14	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	unit	79.674.000	14	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	unit	79.674.000		
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	3	Layanan	511.428.636	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	3	Laporan	511.428.636		
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	laporan	75.040.000	15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	laporan	75.040.000		



16	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	laporan	40.000.000	16	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	laporan	40.000.000		
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	laporan	396.388.636	17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	laporan	396.388.636		
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	3	Layanan	95.000.000,00	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	3	unit	95.000.000,00		
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	28	unit	72.964.000	18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	28	unit	72.964.000		
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	unit	22.036.000	19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	unit	22.036.000		



II	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Kab.Kutai Kartanegara	Cakupan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Ekonomi pada organisasi kemasyarakatan	16,10	Persen	550.000.000	II	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Kab.Kutai Kartanegara	Cakupan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Ekonomi pada organisasi kemasyarakatan	16,10	Perse n	550.000.000		
9	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	2	dokum en	75.000.000	9	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	2	doku men	75.000.000		
20	Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	20	orang	75.000.000	20	Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	20	orang	75.000.000		
10	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah organisasi Perempuan yang bergerak dlm bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi tingkat kabupaten/kota	8	Organis asi	475.000.000	10	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah organisasi Perempuan yang bergerak dlm bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi tingkat kabupaten/kota	8	Organi sasi	475.000.000		
21	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokum en	350.000.000	21	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Doku men	350.000.000		



22	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Organisasi	125.000.000	22	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Organisasi	125.000.000		
III	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kab.Kutai Kartanegara	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	100,000	persen	100.000.000	III	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kab.Kutai Kartanegara	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	100,000	persen	100.000.000		
11	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	1	dokumen	100.000.000	11	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	1	Layanan	100.000.000		
23	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	30	orang	100.000.000	23	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	30	orang	100.000.000		



IV	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Kab.Kutai Kartanegara	Persentase Pusat Pembelajaran Keluarga yang terbentuk dalam mewujudkan KG dan Hak Anak	50	persen	100.000.000	IV	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Kab.Kutai Kartanegara	Persentase Pusat Pembelajaran Keluarga yang terbentuk dalam mewujudkan KG dan Hak Anak	50	persen	100.000.000		
12	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	20	orang	100.000.000	12	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	20	orang	100.000.000		
24	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	100.000.000	24	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	100.000.000		
V	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Kab.Kutai Kartanegara	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Profil Gender dan Anak Tingkat Kabupaten	81,03	persen	80.718.362	V	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Kab.Kutai Kartanegara	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Profil Gender dan Anak Tingkat Kabupaten	81,03	persen	80.718.362		
13	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data	3	dokumen	80.718.362	13	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data	3	dokumen	80.718.362		



25	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	80.718.362	25	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	80.718.362		
VI	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kab.Kutai Kartanegara	Capaian Nilai Kabupaten Layak Anak	780	Nilai	215.000.000	VI	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kab.Kutai Kartanegara	Capaian Nilai Kabupaten Layak Anak	780	Nilai	215.000.000		
14	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah organisasi pelembagaan pemenuhan hak anak yang terbentuk	10	Lembaga	100.000.000	14	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah organisasi pelembagaan pemenuhan hak anak yang terbentuk	10	Lembaga	100.000.000		
26	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	100.000.000	26	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	100.000.000		
15	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan PHA	50	orang	115.000.000	15	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan PHA	50	orang	115.000.000		



27	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	115.000.000	27	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	115.000.000		
VII	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Kab.Kutai Kartanegara	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	100,00	persen	215.000.000	VII	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Kab.Kutai Kartanegara	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	100,00	persen	215.000.000		
16	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kabupaten/Kota	40	Layanan	100.000.000	16	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kabupaten/Kota	40	Layanan	100.000.000		
28	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	6	Layanan	100.000.000	28	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	6	Layanan	100.000.000		



17	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2	dokumen	115.000.000	17	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2	dokumen	115.000.000		
29	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	1	Kegiatan	115.000.000	29	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	1	Kegiatan	115.000.000		
				Jumlah		8.286.055.875					Jumlah		8.286.055.875		



BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Melalui Strategi Nasional (STRANAS) Percepatan PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender (PPRG), berdasarkan permasalahan, sasaran, serta arah Kebijakan Nasional, maka strategi PPRG meliputi strategi umum dan strategi khusus. Strategi umum mengacu pada dua permasalahan yang dihadapi adalah penerapan PPRG di tingkat Nasional dan daerah yaitu :

- a. Penguatan Dasar Hukum
- b. Penguatan koordinasi baik antar sesama Instansi Penggerak maupun antar Penggerak dengan Instansi Pelaksana.

Strategi khusus berupa penjabaran dari strategi umum yaitu penguatan koordinasi melalui serangkaian strategi khusus yang diklasifikasikan menurut tahapan manajemen pembangunan, dari perencanaan hingga evaluasi.

Belum efektifnya kelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan antara lain dapat dilihat :

- 1) Belum optimalnya dukungan politik terhadap Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan sebagai Prioritas Pembangunan
- 2) Belum memadainya kelembagaan dalam pelaksanaan PUG terutama sumber daya manusia serta ketersediaan dan penggunaan data terpilah menurut jenis kelamin dalam siklus pembangunan.
- 3) Masih rendahnya pemahaman mengenai konsep Isu Gender serta manfaat PUG dalam pembangunan.

Masalah lainnya adalah belum tersedianya data terpilah sehingga sulit dalam menemu-kenali masalah-masalah gender yang ada. Partisipasi masyarakat juga belum maksimal dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan. Kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat dan partisipasi dalam pembangunan.

Lambatnya peningkatan nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) setiap tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan kesenjangan gender di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, politik serta pengambilan keputusan yang signifikan yang antara lain disebabkan oleh :

- (1) Masih terdapatnya kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat dan partisipasi dalam pembangunan serta penguasaan terhadap sumber daya pada tataran Kabupaten/Kota,
- (2) Rendahnya peran dan partisipasi perempuan di bidang Politik, Jabatan Publik dan di Bidang Ekonomi,
- (3) Rendahnya kesiapan perempuan dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim, krisis energi, krisis ekonomi, bencana alam dan konflik sosial serta terjadinya



penyakit.

- (4) Penyusunan data terpilah belum dilakukan oleh semua sektor / OPD, belum tersedianya data pembangunan yang terpilah menurut jenis kelamin sehingga sulit dalam menemu-kenali masalah-masalah gender yang ada. Partisipasi masyarakat juga belum maksimal dalam meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak. Pentingnya data terpilah, mengidentifikasi masalah dan dapat dirinci menurut jenis kelamin, wilayah, status sosial, ekonomi, waktu, yang dalam analisisnya menggunakan Analisa Gender. Bentuk data terpilah bisa kuantitatif atau kualitatif, dari data terpilah dapat diketahui posisi dan kondisi kebutuhan masyarakat laki-laki dan perempuan dalam pembangunan dan permasalahannya dengan mengurangi kesenjangan gender :
- a. Pemetaan kebutuhan laki-laki dan perempuan dalam perumusan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. Dapat lebih mudah menentukan intervensi yang tepat pada masing-masing kebutuhan sekaligus mengalokasikan anggaran yang tepat sasaran sesuai kebutuhan dalam *Gender Budget Statement (GBS)*;
 - c. Akan mempermudah dalam proses monitoring dan evaluasi, karena data terpilah dan perencanaan serta analisa gendernya jika sudah tersedia, akan mudah membandingkannya dengan kondisi setelah diintervensi.

Tantangan dan permasalahan dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak semakin bertambah berat dan kompleks. Oleh karena itu, peran aktif masyarakat menjadi sangat penting dan menentukan keberhasilan pencapaian sasaran tersebut. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat faktor penghambat yang dapat menjadi penghalang pencapaian tujuan atau sasaran. Diperlukan kerja keras dan upaya yang serius agar target tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat tercapai. Berikut ini akan diuraikan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan DINAS PP & PA ditinjau dari sasaran jangka menengah RENSTRA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ataupun RENSTRA DINAS PP & PA Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu berfokus pada upaya peningkatan jumlah pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan yang Responsif Gender di Bidang Ekonomi, Politik, Sosial dan Keamanan, kemudian memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak serta memperhatikan tumbuh kembang anak.

Beberapa faktor penghambat yang dihadapi di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pencapaian sasaran di atas antara lain :

- a. Diskriminasi dari pemberi pekerjaan terhadap tenaga kerja perempuan;
- b. Tingkat kompetitif perempuan yang rendah ;
- c. Kurangnya pemahaman pihak-pihak terkait/ stakeholder mengenai PUG;
- d. Rendahnya tingkat pendidikan;
- e. Kurangnya akses pendidikan bagi perempuan;
- f. Kurangnya kesempatan perempuan berpartisipasi dalam pembangunan;
- g. Belum adanya sistem layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban



- kekerasan;
- h. Budaya *patriarckhi* di masyarakat;
 - i. Kurangnya komitmen kepala daerah dan sinergitas lintas sektor;
 - j. Kurangnya koordinasi dan sinergitas kegiatan LSM/LM, ORMAS pemerhati perempuan dan anak;
 - k. Kebijakan daerah belum *responsive gender*;
 - l. Data Terpilah belum dilakukan oleh semua sektor / SKPD; dan
 - m. Belum didukung oleh kualitas dan kuantitas tenaga yang handal.

Namun demikian terdapat kondisi yang merupakan faktor pendorong pelayanan Dinas PP PA Kabupaten Kutai Kartanegara yang dapat mengatasi permasalahan pelayanan dan dapat mendorong pencapaian sasaran tersebut. Beberapa faktor pendorong diantaranya adalah:

- a) Masih terbukanya kesempatan kerja yang luas;
- b) Telah adanya regulasi yang *responsive gender*;
- c) Telah adanya program pengentasan kemiskinan;
- d) Telah adanya Komitmen Kepala Daerah mengenai PUG;
- e) Telah adanya Regulasi terkait Perlindungan Perempuan dan Anak;
- f) Telah adanya Komitmen Pemerintah Pusat dan Provinsi tentang KLA;

Di Bidang Partisipasi Anak telah diterbitkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak, dan 2 (dua) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Forum Anak, sampai dengan Tahun 2016 terbentuk FORUM Anak di tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa se Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai salah satu bentuk wadah partisipasi anak. Partisipasi anak dalam proses perencanaan pembangunan sudah dilibatkan baik ditingkat Nasional maupun di daerah. Di tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara sejak Tahun 2013 melibatkan Forum Anak dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah. Selain itu Kementerian PPPA juga mengikutsertakan Forum Anak Daerah dalam Konferensi Tingkat Asia yang di laksanakan di Kota Solo, yang membahas tentang partisipasi anak dan Kabupaten / Kota Layak Anak, serta seleksi anak berbakat melalui Tunas Muda Pemimpin Indonesia (TMPI) di Tingkat Provinsi KALTIM.

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) belum tertangani dengan baik dikarenakan belum adanya koordinasi yang baik antara lintas OPD sehingga mempersulit penanganannya terutama yang ada di wilayah kecamatan, dan terbatasnya pengetahuan orang tua/keluarga yang memiliki ABK terhadap anaknya sehingga malu dan menyembunyikan/menjauhkan anak dari masyarakat sehingga pemenuhan hak ABK menjadi terhambat dan tidak optimal. Disamping itu jumlah guru disekolah yang memiliki pengetahuan dan keterampilan menangani ABK masih sangat terbatas, sehingga banyak tidak dapat bersekolah di sekolah umum Inklusi. Data ABK dari SLB tahun 2014 berjumlah 111 orang dan di tahun 2015 berjumlah 125 Orang. Ini menunjukkan anak penyandang disabilitas dari seluruh anak di Kabupaten Kutai Kartanegara setiap tahun meningkat.



Permasalahan sosial anak mencakup area yg cukup luas dan merupakan isu lintas sektoral, antara lain yang mengalami eksploitasi secara ekonomi (pekerja anak). Anak korban penyalahgunaan narkoba yang dibina dikalapas Kelas II B Tenggarong pada tahun 2014 berjumlah 22 orang dan tahun 2015 sebanyak 15 orang. Yang perlu diperhatikan lagi yaitu zat adiktif lainnya diantaranya anak menghisap lem semakin marak dan meresahkan masyarakat hampir disetiap Kecamatan, di Kabupaten Kutai Kartanegara ada anak yang melakukan hal tersebut. Perkawinan usia anak masih banyak terutama di desa-desa terpencil. Masalah sosial yang dialami oleh anak pada umumnya berasal dari keluarga miskin yang tidak bisa memberikan pengasuhan secara baik dan keluarga yang tidak utuh (broken home).

Capaian pembangunan anak, kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan anak difokuskan pada 3 (tiga) hal yaitu : pencegahan, pelayanan dan penanganan masalah yang dihadapi anak. Prinsip – prinsip yang harus selalu diterapkan dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak adalah :

- a. Non – Diskriminasi : yaitu prinsip pemenuhan hak anak yang tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, agama, paham politik, asal kebangsaan suku, status ekonomi, kondisi fisik anak, atau faktor lainnya.
- b. Kepentingan terbaik untuk anak yaitu mengupayakan semua keputusan kegiatan dan dukungan dari para pihak yang berpengaruh semata mata untuk kepentingan terbaik untuk anak.
- c. Mengutamakan hak anak untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, yaitu kegiatan yang disusun untuk meningkatkan perkembangan anak berdasarkan kemampuan dan sifat perkembangannya.
- d. Menghormati pandangan anak ,yaitu memperhatikan dan memasukkan pandangan dan kebutuhan anak dalam setiap proses pembahasan dan pengambilan keputusan setiap kegiatan.

Dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak, capaian ditandai dengan terpenuhinya hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta meningkatnya perlindungan anak dari tindak kekerasan, penelantaran, eksploitasi dan perlakuan salah lainnya.

Upaya percepatan pemilikan akte kelahiran dilakukan melalui penetapan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada 24 Desember 2013. MoU delapan menteri (Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Agama, Menteri Sosial dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Percepatan Kepemilikan Akte Kelahiran.

Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABDH) dengan diterapkannya undang-undang no 11 tahun 2012 tentang peradilan anak maka anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan rehabilitasi (anak ini diberikan hak-haknya terutama untuk memperoleh pendidikan walaupun berhadapan dengan hukum).

Kabupaten Kutai Kartanegara ditunjuk langsung oleh Presiden RI melalui Kementerian PP PA RI pada Tahun 2006 bersama 4 (empat) Kabupaten/Kota menjadi



KABUPATEN MENUJU KOTA LAYAK ANAK (Sidoarjo, Gorontalo, Jambi, Solo, dan Kutai Kartanegara) dengan Pendukung PERDA NO 9 Tahun 2004 Tentang ZONA BEBAS PEKERJA ANAK. Pada Tahun 2013 Presiden RI melalui Kementerian PP PA menunjuk Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai salah satu dari 5 Kabupaten / Kota di Indonesia untuk mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak RI nomor 56 Tahun 2010 tanggal 26 Juli 2010 tentang Penunjukan & Penetapan Kabupaten/Kota Yang Mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak bersama 5 daerah Kabupaten /Kota lainnya menganugerahkan KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA sebagai KABUPATEN KOTA LAYAK ANAK di Tingkat PRATAMA dari 37 Kabupaten/Kota se Indonesia. Untuk mempercepat terwujudnya Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kutai Kartanegara, di pandang perlu adanya :

1. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 334/ SK – Bup/ HK/ 2012 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Pengembangan Layak Anak (KLA).
2. Instruksi Bupati Kutai Kartanegara nomor 1 Tahun 2012 tentang pengembangan Program dan Anggaran terhadap percepatan Kutai Kartanegara sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) bagi setiap OPD sesuai dengan Indikator dan Tupoksi OPD Kabupaten Kutai Kartanegara
3. Instruksi Bupati Kutai Kartanegara nomor 2 Tahun 2012 tentang PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK (KLA) DI KECAMATAN DAN KELURAHAN / DESA Penentuan
4. Bahkan Anak berhadapan dengan hukum harus melanjutkan sekolah dari tingkat SD / SLTP / MTS / Pesantren / SLTA / dan Perguruan Tinggi di fasilitasi oleh TIM KOORDINASI PENANGANAN MASALAH SOSIAL PEREMPUAN DAN ANAK DI TK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA. Dalam rangka memenuhi hak dan melindungi anak di lembaga pendidikan, pada tahun 2014 KEMEN PPPA menggagas tersusunya Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) bersama 9 (Sembilan) K / L terkait (Kementerian PPPA RI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, BNPN, dan BPOM), lembaga masyarakat, lembaga Internasional, lembaga pemerhati anak dan pakar anak.

Kabupaten/kota layak anak adalah sistem pembangunan Kabupaten/Kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak & perlindungan anak. Alasan mengapa Kabupaten/Kota Layak Anak perlu dilaksanakan karena:

- a. Anak adalah amanah Tuhan yang perlu dipertanggungjawabkan secara pribadi dan sosial;
- b. Jumlah anak 30 - 36% dari total penduduk , tidak bisa diabaikan;
- c. Perubahan global mengancam tata nilai agama, sosial, dan budaya lokal;
- d. Embrio SDM yang handal dan tangguh menentukan masa depan bangsa dan negara; dan
- e. Anak terancam menjadi korban kekerasan, pelecehan, diskriminasi, perlakuan salah.



Pengembangan menuju Kabupaten/Kota Layak Anak yang belum menyeluruh, yang mana Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2013 telah mendapat penghargaan pada tingkat Pratama dengan adanya penghargaan ini diharapkan kepada seluruh SKPD terkait untuk dapat mengintegrasikan kedalam program SKPD masing-masing sesuai dengan tupoksinya.

Di Bidang Pemenuhan hak Kesehatan Anak, Kementerian PPPA RI bersama tiga Kementerian terkait (Kementerian PPPA RI, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri) telah mendorong terbentuknya Puskesmas Ramah Anak (PRA) dalam rangka mengurangi kesakitan pada anak sampai dengan tahun 2016 di Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki 1 PUSKEMAS yang menginisiasi menuju Puskesmas Ramah Anak yaitu Puskesmas Rapak Mahang. Upaya pemenuhan hak kesehatan anak lainnya seperti penurunan angka kematian bayi (ABK) di bulan Januari s/d Agustus Tahun 2016 berjumlah 90 Orang dan Angka Kematian Bayi dan Anak (AKBK), hasil survey PSG balita Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 status Kekurangan GIZI 22,67% se Kabupaten Kutai Kartanegara. Peningkatan ketersediaan air bersih Tahun 2015 daerah perkotaan sebanyak 80% dan daerah pedesaan 60 % dari jumlah penduduk Kutai Kartanegara.

Di bidang lingkungan dan penanaman nilai-nilai luhur, telah dilakukan beberapa upaya seperti mendorong tersedianya Rute Aman Sekolah ke / dari Sekolah (RASS) terkait (DPPA, Perhubungan, Ciptakarya, Dikbud, Kementerian Agama dan POLRES KUKAR) selain itu juga dilakukan sosialisasi, KIE, dan pelatihan kepada FORUM ANAK di Tingkat kabupaten dan di tingkat kecamatan dalam upaya penanaman wawasan kebangsaan dan cinta tanah air. Dalam upaya mendukung penciptaan infrastruktur yang ramah anak juga telah diinisiasi Penyusunan Rancangan Kebijakan Ruang BERMAIN RAMAH ANAK. Dalam rangka Meningkatkan peran PERLINDUNGAN ANAK, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mengeluarkan PERDA NO 20 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang dapat dijadikan acuan bagi PEMDA dalam mendorong peningkatan partisipasi dan kualitas hidup anak di segala bidang dalam rangka melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Maksud dari dibuatnya Rencana kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 adalah untuk menentukan arah pelaksanaan pembangunan serta sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun yang sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati/Wakil Bupati Kutai Kartanegara Periode 2016-2021. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2023.



Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu :

1. Menciptakan keterpaduan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai Visi Misi Pemerintah Daerah.
2. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas PP dan PA dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu terarah dan terukur.
3. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 1 tahun.
4. Memberikan pedoman alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara



BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Program dan Kegiatan

a. Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Dinas PP & PA Kabupaten Kutai Kartanegara berusaha memberikan pelayanan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan visi, misi dan program bupati dan wakil bupati. Dalam upaya pemberian layanan pada masyarakat masih terdapat permasalahan yang disebabkan adanya faktor penghambat. Namun demikian terdapat faktor pendorong yang berkontribusi positif dalam perbaikan layanan, dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

No.	Visi	Misi	Masalah	Akar Masalah	Alternatif Pemecahan Masalah	Program
1	2	3	4	5	6	7
	Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya	Masih tingginya korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dan belum didampingi seluruhnya oleh tenaga terlatih	Belum memiliki pendamping korban tingkat kecamatan/desa	Membentuk kelompok Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
				Kurangnya pemahaman masyarakat dampak dari kekerasan pada perempuan dan anak	Memberikan pemahaman ke masyarakat tentang kekerasan dan dampak dari kekerasan pada perempuan dan anak	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan



No.	Visi	Misi	Masalah	Akar Masalah	Alternatif Pemecahan Masalah	Program
1	2	3	4	5	6	7
			Kurangnya pemahaman stakeholder terhadap hak-hak anak	Para pengambil kebijakan belum banyak membuat kebijakan yang responsif anak	Mendorong stakeholder untuk responsif terhadap pemenuhan hak anak	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
						Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
						Program Pemenuhan Hak-Hak Anak
			Kelembagaan PUG di OPD belum Optimal	Masih Banyak ASN yang Belum Memahami Tentang PUG	Fasilitasi dan advokasi kepada OPD beserta seluruh ASN didalamnya untuk implementasi PUG	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
			Rendahnya Angka IPG dan IDG	Belum Optimalnya OPD yang terkait Dengan IPG dan IDG	Sinkronisasi dan Penguatan Indikator Variabel IPG dan IDG oleh Masing Masing OPD Terkait	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
			Belum terwujudnya keadilan dan kesetaraan Gender (KKG) secara maksimal	Rendahnya Pratisipasi terhadap Pembangunan Kesetaraan Gender	Mempercepat Implementasi PUG dan Memperkuat Peran Perempuan dalam Berbagai Aspek Pembangunan	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
			Implementasi Kebijakan masih belum Optimal	Konsistensi terhadap pelaksanaan kebijakan masih kurang	Memperkuat dan Mempertajam pelaksanaan kebijakan terhadap peran, kedudukan dan fungsi pemberdayaan pp dan anak	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
			Kurangnya perempuan sebagai pelaku ekonomi	Akses pp dalam mendapatkan informasi usaha masih sulit.2.Kurangnya permodalan usaha.3.Rendahnya kualitas SDM	Memberikan akses Informasi dan kesempatan seluas luasnya bagi perempuan untuk memperoleh bantuan modal serta memberikan bimbingan manajemen usaha	Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan



b. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Untuk menyesuaikan dengan perkembangan situasi, maka kegiatan pada Dinas PP dan PA Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2023 mengalami perubahan baik dari jumlah kegiatan dan rencana pagu dana. Adapun jumlah kegiatan dalam tahun 2023 adalah sebanyak 22 Kegiatan dan 7 Program.

Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Renstra Kementerian dan Provinsi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ada perubahan terhadap indikator program :

No	Program/Pembangunan	Indikator	Cara Hitung
1.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Keterwakilan Perempuan Dalam Jabatan	Jumlah keterwakilan perempuan dalam jabatan dibagi jumlah jabatan dikali 100
2.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Profil Gender dan Anak Tingkat Kabupaten	Jumlah PD yang memiliki data gender dibagi jumlah PD dikali 100
3.	Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah Perempuan mengalami kekerasan dibagi Jumlah Penduduk Perempuan x100



No	Program/Pembangunan	Indikator	Cara Hitung
4.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah Anak (Penduduk Usia Kurang dari 18 Tahun korban kekerasan yang ditangani Instansi tingkat Ka/Kota yang didampingi dibagi jumlah Anak (Penduduk Usia Kurang dari 18 Tahun) x 100%
5.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kabupaten Layak Anak	Jumlah kecamatan yang menginisiasi KLA dibagi dengan jumlah kecamatan x 100
6.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak	

c. Rumusan Program dan Kegiatan tidak Sesuai dengan Rancangan awal

Dalam melakukan perumusan Program dan kegiatan sejauh ini masih sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara, Akan tetapi dari penetapan pagu Indikatif terdapat ada beberapa perubahan dalam penyusunan renja Tahun 2025, yaitu adanya **Mall Pelayanan Perempuan dan Anak (MPPA)** yang saat ini sedang dalam proses louncing sebagai bentuk pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada masyarakat yang memerlukan perlindungan terhadap Perempuan dan anak.



d. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025
OKabupaten Kutai Kartanegara**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 8 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah		76,5 Persen	20.262.672.445,00	APBD		76,5 Persen	18.262.672.445,00
2 8 1 2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6 Dokumen	650.000.000,00	APBD		6 Dokumen	650.000.000,00
2 8 1 2 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	3 dokumen	200.000.000,00	APBD	Rapat kerja penyusunan RENSTRA, RENJA, RKA/DPA	3 dokumen	200.000.000,00
2 8 1 2 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Kutai Kartanegara	3 laporan	300.000.000,00	APBD	Musrenbang, pendampingan SPIP, LKJIP, LPPD, Sakip, Rakor DPPA	3 laporan	300.000.000,00
2 8 1 2 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	1 laporan	150.000.000,00	APBD	Monev kegiatan dinas, Pendampingan Epantau	1 laporan	150.000.000,00



2	8	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel		2 Dokumen	9.462.672.445,00	APBD		2 Dokumen	9.462.672.445,00
2	8	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Kutai Kartanegara	40 orang/bulan	9.062.672.445,00	APBD	Gaji ASN, TPP	40 orang/bulan	9.062.672.445,00
2	8	1	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab.Kutai Kartanegara	2 laporan	400.000.000,00	APBD	Honor PA, KPA, PPK, bendahara pengeluaran, LK, Manajemen RTP, rapat kerja keuangan	2 laporan	400.000.000,00
2	8	1	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah		1 Laporan	250.000.000,00	APBD		1 Laporan	250.000.000,00
2	8	1	2	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab.Kutai Kartanegara	2 laporan	250.000.000,00	APBD	Laporan BMD, inventaris aset, rapat kerja urusan BMD, Rekon BMD	2 laporan	250.000.000,00
2	8	1	2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian		2 Layanan	800.000.000,00	APBD		2 Layanan	800.000.000,00
2	8	1	2	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab.Kutai Kartanegara	40 orang	300.000.000,00	APBD	Sosialisasi peraturan perundangan PPA dan peraturan perundangan lainnya	40 orang	300.000.000,00



2	8	1	2	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab.Kutai Kartanegara	40 orang	500.000.000,00	APBD	Bimtek arsip, bimtek manajemen pelayanan dan RB, bimtek IT / Statistik, bimtek perencanaan, bimtek program keuangan, bimtek manajemen resiko, bimtek SPIP, bimtek e-kin, bimtek PPTK, bimtek RTP, bimtek SDI/becik, bimtek barang dan jasa	40 orang	500.000.000,00
2	8	1	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah		7 Layanan	1.800.000.000,00	APBD		7 Layanan	1.800.000.000,00
2	8	1	2	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab.Kutai Kartanegara	1 paket	150.000.000,00	APBD	Alat Tulis Kantor	1 paket	150.000.000,00
2	8	1	2	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab.Kutai Kartanegara	1 paket	200.000.000,00	APBD	Makan minum rapat dan peralatan rumah tangga	1 paket	200.000.000,00
2	8	1	2	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab.Kutai Kartanegara	1 paket	200.000.000,00	APBD	Kalender, Map, Souvenir, Merchandise	1 paket	200.000.000,00
2	8	1	2	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab.Kutai Kartanegara	1 dokumen	50.000.000,00	APBD	Perpustakaan anak dan perempuan, pojok baca	1 dokumen	50.000.000,00



2	8	1	2	7	Penyediaan Bahan /Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab.Kutai Kartanegara	1 paket	300.000.000,00	APBD	Pameran Merah Putih, Erau dll (homestay, sewa stand, design pameran, makan minum pameran, doorprize)	1 paket	300.000.000,00
2	8	1	2	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab.Kutai Kartanegara	1 laporan	150.000.000,00	APBD		1 laporan	150.000.000,00
2	8	1	2	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Kutai Kartanegara	1 laporan	500.000.000,00	APBD	Fasilitasi Kadis, Sekretaris, Kabid, Kasubag, ASN, JF	1 laporan	500.000.000,00
2	8	1	2	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab.Kutai Kartanegara	1 dokumen	250.000.000,00	APBD	Tata kelola arsip	1 dokumen	250.000.000,00
2	8	1	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah		67 Unit	3.100.000.000,00	APBD		51 Unit	1.100.000.000,00
2	8	1	2	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab.Kutai Kartanegara	1 unit	500.000.000,00	APBD	Pembangunan pagar UPT	1 unit	500.000.000,00
2	8	1	2	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab.Kutai Kartanegara	30 unit	300.000.000,00	APBD	Mebeuleir	30 unit	300.000.000,00
2	8	1	2	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab.Kutai Kartanegara	20 unit	300.000.000,00	APBD	Komputer, Printer, Laptop	20 unit	300.000.000,00
2	8	1	2	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional	Jumlah unit kendaraan bermotor penumpang yang Disediakan	Kab.Kutai Kartanegara	16 unit	2.000.000.000,00	APBD	Kendaraan dinas mobil kabid dan mobil pelayanan serta mobil angkut pickup, sepeda motor	unit	0,00



2	8	1	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah		3 Laporan	2.250.000.000,00	APBD		3 Laporan	2.250.000.000,00
2	8	1	2	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab.Kutai Kartanegara	1 laporan	350.000.000,00	APBD	Listrik dan Wifi MPPA	1 laporan	350.000.000,00
2	8	1	2	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab.Kutai Kartanegara	1 laporan	100.000.000,00	APBD	Perawatan peralatan komputer, AC, sound system, printer, mesin foto copy dll	1 laporan	100.000.000,00
2	8	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab.Kutai Kartanegara	1 laporan	1.800.000.000,00	APBD	Honorarium THL, tenaga ahli progremer, statistik, IT, Jurnalis, CS, Satpam, Psikolog Klinis, Konselor	1 laporan	1.800.000.000,00
2	8	1	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah		37 Unit	1.950.000.000,00	APBD		37 Unit	1.950.000.000,00
2	8	1	2	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab.Kutai Kartanegara	30 unit	300.000.000,00	APBD		30 unit	300.000.000,00



2	8	1	2	2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab.Kutai Kartanegara	4 unit	150.000.000,00	APBD		4 unit	150.000.000,00
2	8	1	2	9		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab.Kutai Kartanegara	3 unit	1.500.000.000,00	APBD	Rehab gedung serba guna, untuk forum anak dan satgas PPA (ex gedung BKKBN)	3 unit	1.500.000.000,00
2	8	2				PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan Pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi pada organisasi kemasyarakatan		16,1 Persen	3.000.000.000,00	APBD		16,1 Persen	3.000.000.000,00
2	8	2	2	1		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelembagaan PUG pada lembaga Pemerintah kewenangan Kabupaten/Kota		56 Lembaga	950.000.000,00	APBD		56 Lembaga	950.000.000,00
2	8	2	2	1	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	1 Dokumen	250.000.000,00	APBD	Pelaksanaan penyusunan RAD PUG (Lokus Tenggarong)	1 Dokumen	250.000.000,00
2	8	2	2	1	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	1 laporan	250.000.000,00	APBD	Pembentukan tim Pokja PUG kab. Kukar berdasarkan SK Bupati.	1 laporan	250.000.000,00
2	8	2	2	1	6	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	Kab.Kutai Kartanegara	40 orang	250.000.000,00	APBD	Pendampingan penyusunan PPRG (GBS dan GAP)	40 orang	250.000.000,00



2	8	2	2	1	8	Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	40 orang	200.000.000,00	APBD	Sosialisasi peraturan perundangan-undangan tentang PUG (Lokus samarinda dan balikpapan)	40 orang	200.000.000,00
2	8	2	2	2		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan yang bergerak dlm bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan		28 Organisasi	700.000.000,00	APBD		28 Organisasi	700.000.000,00
2	8	2	2	2	1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	1 Dokumen	350.000.000,00	APBD	Sosialisasi peraturan perundangan untuk peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang polhum dan sosek.	1 Dokumen	350.000.000,00
2	8	2	2	2	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	28 Organisasi	350.000.000,00	APBD	Rakor lembaga/organisasi perempuan kab. Kukar.	28 Organisasi	350.000.000,00
2	8	2	2	3		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota		28 lembaga	1.350.000.000,00	APBD		28 lembaga	1.350.000.000,00



2	8	2	2	3	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Kab.Kutai Kartanegara	40 orang	500.000.000,00	APBD	Pelatihan tata kelola layanan pemberdayaan perempuan. (Lokus Tenggarong)	40 orang	500.000.000,00
2	8	2	2	3	4	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Kab.Kutai Kartanegara	28 Lembaga	700.000.000,00	APBD	Advokasi kebijakan dan pendampingan serta fasilitasi kegiatan organisasi perempuan. (Lokus tersebar)	28 Lembaga	700.000.000,00
2	8	2	2	3	6	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab.Kutai Kartanegara	1 Dokumen	150.000.000,00	APBD	Pemberitaan kegiatan pemberdayaan perempuan (video, medsos, banner, leaflet. Baliho)	1 Dokumen	150.000.000,00
2	8	3				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif		100 Persen	2.200.000.000,00	APBD		100 Persen	2.200.000.000,00
2	8	3	2	1		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencegahan kekerasan terhadap perempuan		2 Dokumen	700.000.000,00	APBD		2 Dokumen	700.000.000,00
2	8	3	2	1	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	2 dokumen	400.000.000,00	APBD	1.Rakor pembentukan satgas PPA kekerasan terhadap perempuan. (Lokus kab. kukar) 2. Monev pelaksanaan program kebijakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	2 dokumen	400.000.000,00



2	8	3	2	1	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	11 perangkat daerah	300.000.000,00	APBD	1. Advokasi kebijakan tentang penyusunan perda perlindungan perempuan kab kukar 2. Advokasi pendampingan layanan perlindungan perempuan pada perangkat daerah terkait	11 perangkat daerah	300.000.000,00
2	8	3	2	2		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupaten/Kota		6 Layanan	700.000.000,00	APBD		6 Layanan	700.000.000,00
2	8	3	2	2	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Kab.Kutai Kartanegara	50 orang	500.000.000,00	APBD	penjangkauan korban, visum, Biaya pengobatan dan perawatan rawat inap dan rawat jalan dan akomodasi korban /makan dan minum korban	50 orang	500.000.000,00



2	8	3	2	2	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	6 layanan	200.000.000,00	APBD	Layanan tindak lanjut pengaduan kasus Perempuan Ke Luar Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (rujukan ke RSUD provinsi, pengantaran korban ke luar daerah)	6 layanan	200.000.000,00
2	8	3	2	3		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah Kabupaten/Kota		6 Layanan	800.000.000,00	APBD		6 Layanan	800.000.000,00
2	8	3	2	3	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	1 laporan	200.000.000,00	APBD	Advokasi fasilitasi sapsras bagi penyediaan layanan perempuan korban kekerasan kab. Kukar	1 laporan	200.000.000,00
2	8	3	2	3	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Kab.Kutai Kartanegara	60 orang	300.000.000,00	APBD	Pelatihan/Bimtek manajemen penanganan kasus bagi SDM, ASN, UPT P2TP2A, Tenaga Teknis profesional pada DP3A. (Lokus Samarinda / Balikpapan)	60 orang	300.000.000,00



2	8	3	2	3	3	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Kab.Kutai Kartanegara	50 orang	50.000.000,00	APBD	Fasilitasi pembelian kebutuhan khusus perempuan (Lokus Kab. Kukar)	50 orang	50.000.000,00
2	8	3	2	3	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	1 dokumen	250.000.000,00	APBD	Bimtek lembaga layanan perlindungan perempuan Dharma wanita, PKK, GOW dll (Lokus Samarinda)	1 dokumen	250.000.000,00
2	8	4				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase pusat pembelajaran keluarga yang terbentuk dalam mewujudkan KG dan hak anak		50 Persen	1.600.000.000,00	APBD		50 Persen	1.600.000.000,00
2	8	4	2	1		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak tingkat daerah Kabupaten/Kota		3 dokumen	550.000.000,00	APBD		3 dokumen	550.000.000,00
2	8	4	2	1	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	5 Perangkat Daerah	200.000.000,00	APBD	PKS dengan 5 perangkat daerah (Lokus 3 OPD dan 2 kecamatan)	5 Perangkat Daerah	200.000.000,00
2	8	4	2	1	2	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab.Kutai Kartanegara	4 Dokumen	150.000.000,00	APBD	Pembuatan media promosi kualitas keluarga (spanduk, pamflet, media siaran, brosur) lokasi tersebar	4 Dokumen	150.000.000,00



2	8	4	2	1	3	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	3 Laporan	200.000.000,00	APBD	Puspaga dalam rangka kampanye perubahan perilaku percepatan penurunan stunting (Lokus Kab. Kukar)	3 Laporan	200.000.000,00
2	8	4	2	2		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak		6 Lembaga	1.050.000.000,00	APBD		6 Lembaga	1.050.000.000,00
2	8	4	2	2	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	Kab.Kutai Kartanegara	4 Lembaga	300.000.000,00	APBD	Advokasi kebijakan dan pendampingan lembaga - lembaga non formal seperti LKSA, LK3, Lembaga - lembaga Keagamaan (Lokus Kab. Kukar)	4 Lembaga	300.000.000,00
2	8	4	2	2	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	50 Orang	400.000.000,00	APBD	Pelatihan peningkatan kualitas keluarga untuk menurunkan kemiskinan dan stunting (Pelatihan pijat refleksi untuk perempuan kepala keluarga) Lokus Samboja dan Tenggarong seberang	50 Orang	400.000.000,00



2	8	4	2	2	3	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	2 Dokumen	350.000.000,00	APBD	Pelatihan tata kelola layanan peningkatan kualitas keluarga (Lokus tersebar di kukar)	2 Dokumen	350.000.000,00
2	8	5				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase perangkat daerah yang memiliki data gender dan anak		81,03 Persen	250.000.000,00	APBD		81,03 Persen	250.000.000,00
2	8	5	2	1		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data tingkat Kabupaten/Kota		4 Dokumen	250.000.000,00	APBD		4 Dokumen	250.000.000,00
2	8	5	2	1	1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab.Kutai Kartanegara	1 Dokumen	150.000.000,00	APBD	Penyediaan data gender dan anak kab. Kukar	1 Dokumen	150.000.000,00
2	8	5	2	1	2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	1 Dokumen	100.000.000,00	APBD	Rakor / Seminar penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak kab. Kukar.	1 Dokumen	100.000.000,00
2	8	6				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Capaian Nilai Kabupaten Layak Anak		780 Nilai	1.285.000.000,00	APBD		780 Nilai	1.285.000.000,00
2	8	6	2	1		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah dan dunia usaha kewenangan Kabupaten/Kota		2 Dokumen	400.000.000,00	APBD		2 Dokumen	400.000.000,00



2	8	6	2	1	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Kab.Kutai Kartanegara	30 Organisasi	250.000.000,00	APBD	Pelatihan konvensi hak anak lokus tersebar dan berdasarkan SK Kadisdik dan Kadinkes dan Target 20 Organisasi / 40 Orang Peserta (20 Sekolah Ramah Anak dan 20 Puskesmas Ramah Anak)	30 Organisasi	250.000.000,00
2	8	6	2	1	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	2 Dokumen	150.000.000,00	APBD	Pembinaan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak berdasarkan SK Bupati Kukar (Perubahan SK dan Laporan Kegiatan)	2 Dokumen	150.000.000,00
2	8	6	2	2		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota		4 Dokumen	885.000.000,00	APBD		4 Dokumen	885.000.000,00
2	8	6	2	2	1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	300 Orang	250.000.000,00	APBD	Peringatan Hari Anak Nasional dan Jambore Forum Anak (Lokus Tenggarong)	300 Orang	250.000.000,00



2	8	6	2	2	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	2 Dokumen	150.000.000,00	APBD	Perpustakaan ramah anak, pusat informasi sahabat anak yang akan distandarisi (Lokus tersebar, sesuai surat keputusan kadisdik dan kadispur)	2 Dokumen	150.000.000,00
2	8	6	2	2	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	4 Dokumen	185.000.000,00	APBD	Pembuatan media promosi pemenuhan hak anak (spanduk, pamflet, media siaran, brosur) lokasi tersebar	4 Dokumen	185.000.000,00
2	8	6	2	2	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	7 Dokumen	300.000.000,00	APBD	Pembentukan forum anak tingkat kecamatan dan kelurahan dasar intruksi bupati kukar tahun 2023 (Lokus 6 kecamatan dan 1 kelurahan)	7 Dokumen	300.000.000,00
2	8	7				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif		100 Persen	3.250.000.000,00	APBD dan DNF		100 Persen	3.250.000.000,00
2	8	7	2	1		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/Kota		2 dokumen	800.000.000,00	APBD dan DNF		2 dokumen	800.000.000,00



2	8	7	2	3	3	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KTA terpadu	Kab.Kutai Kartanegara	2 Kegiatan	500.000.000,00	APBD dan DNF	1. Penyusunan PKS dg instansi kab/kota serta monitoring dan Evaluasi PKS yg sdh ada dg kab/kota (Lokus Samarinda, Balikpapan, PPU, Kutin, Kubar, Bontang, RSJ Samarinda, RS Abdoel Moeis) 2. DRPPA percontohan di 10 desa berdasarkan zonasi di kab. Kukar	2 Kegiatan	500.000.000,00
2	8	7	2	1	4	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Kab.Kutai Kartanegara	30 orang	300.000.000,00	APBD	1.Pencegahan KTA di kecamatan (Sekolah SMA-SMP) 2. Sosialisasi siswa-siswi untuk wilayah tenggarong	30 orang	300.000.000,00
2	8	7	2	2		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kabupaten/Kota		6 Layanan	1.600.000.000,00	APBD		6 Layanan	1.600.000.000,00



2	8	7	2	2	5	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Kab.Kutai Kartanegara	100 orang	1.000.000.000,00	APBD	penjangkauan korban, visum, Biaya pengobatan dan perawatan rawat inap dan rawat jalan dan akomodasi korban /makan dan minum korban	100 orang	1.000.000.000,00
2	8	7	2	2	6	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Kab.Kutai Kartanegara	25 layanan	250.000.000,00	APBD	Layanan tindak lanjut pengaduan kasus anak Ke Luar Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (rujukan ke RSUD provinsi, pengantaran korban ke luar daerah)	25 layanan	250.000.000,00
2	8	7	2	2	7	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	1 Dokumen	250.000.000,00	APBD	Brosur dan spanduk tambahan aspirasi masy 200 juta	1 Dokumen	250.000.000,00
2	8	7	2	2	8	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	1 Dokumen	100.000.000,00	APBD	Satgas PPA	1 Dokumen	100.000.000,00



2	8	7	2	3		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang dibentuk		2 Dokumen	850.000.000,00	APBD		2 Dokumen	850.000.000,00
2	8	7	2	3	4	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK di tingkat Provinsi yang memiliki sarana dan prasarana layanan sesuai standar	Kab.Kutai Kartanegara	16 Lembaga	250.000.000,00	APBD	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Anak (LKSA)	16 Lembaga	250.000.000,00
2	8	7	2	3	5	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	Kab.Kutai Kartanegara	2 Kegiatan	300.000.000,00	APBD	1. Pembentukan PPATBM di 10 desa dan kelurahan 2. Kaji Tiru PPTABM, Dinkes, Dinsos, Kepolisian, Kejaksaan, DP3A	2 Kegiatan	300.000.000,00
2	8	7	2	3	6	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/ Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	Kab.Kutai Kartanegara	50 orang	300.000.000,00	APBD	Pelatihan/Bimtek manajemen penanganan kasus bagi PPABM di 20 desa dan kelurahan serta lembaga terkait pelaksanaan di samarinda / balikpapan	50 orang	300.000.000,00
										31.847.672.445,00				29.847.672.445,00



BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini merupakan Dokumen Perencanaan Tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025. Adapun proses penyusunan RKPD Tahun 2025 mengacu pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan rencana kerja pemerintah, maka dengan beberapa catatan sebagai berikut :

a) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian

1. Kondisi sarana dan prasarana yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara masih belum memadai terutama untuk keperluan printer dan komputer yang sudah banyak mengalami rusak berat.
2. Keadaan kantor yang masih belum representatif untuk menyelenggarakan organisasi dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak khususnya ruangan untuk menangani kekerasan perempuan dan anak serta keperluan ruang arsip dan ruang barang rusak.
3. Ketiadaan sumber daya aparatur yang khusus untuk menangani perempuan dan anak korban kekerasan dari segi psikologis menjadikan kendala bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara dalam operasional organisasi.
4. Banyak lokasi korban kekerasan pada perempuan dan anak yang memerlukan biaya besar untuk dijangkau.
5. Mall Pelayanan Perempuan dan Anak (MPPA) yang masih memerlukan bangunan fasilitas sapsras dan SDM

b) Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak disesuaikan dengan adanya Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditunjuk langsung oleh Presiden RI melalui Kementerian PPPA RI pada Tahun 2006 bersama empat kabupaten/kota menjadi kabupaten menuju Kabupaten Layak Anak (Sidoarjo, Gorontalo, Jambi, Solo, dan Kutai Kartanegara) diperkuat dengan Instruksi Bupati Kutai Kartanegara nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) di Kecamatan dan Kelurahan/ Desa. Dalam menentukan arah jalannya organisasi salah satunya



adalah Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

c) Rencana Tindak Lanjut.

1. Mendorong upaya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga melalui pendirian aktifis Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat (PATBM) di setiap kecamatan dan di setiap desa ataupun kelurahan.
2. Mendorong upaya pembinaan pelaku usaha perempuan dalam rangka meningkatkan perekonomian perempuan di Kabupaten Kutai Kartanegara
3. Mendorong OPD baik OPD di Kabupaten maupun OPD kecamatan untuk menginisiasi Kecamatan Layak Anak
4. Mendorong Pembangunan Mall Pelayanan Perempuan dan Anak (MPPA) di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh disiplin, dedikasi dan kerja keras, oleh sumber daya manusia di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dalam upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara merencanakan pembangunan daerah dan menciptakan *good governance* khususnya di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tenggarong, 25 Januari 2024

Kepala
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Kabupaten Kutai Kartanegara


Dr. H. Bambang Arwanto, AP., M.Si
NIP. 19740111 199311 1 002